



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 410 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
- b. bahwa penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal **26** Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI
NOMOR ~~410~~ TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko. Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
7. Kegiatan pengawasan lainnya; dan

8. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko. Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksaan;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a. Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b. Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c. Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan dan jenis pengawasan.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Pemberian layanan Konsultansi; dan
- d. Pendampingan MR.

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi;
- d. Pengelolaan Keuangan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Penyalahgunaan wewenang;

- c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemda;
- c. Reviu Laporan Keuangan OPD;
- d. Reviu PBJ;
- e. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- f. Reviu LKJiP;
- g. Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- h. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- i. Reviu Harga Penawaran Sendiri (HPS);
- j. Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- k. Reviu Analisis Standar Biaya (ASB);
- l. Reviu Manajemen ASN;
- m. Reviu BMD;
- n. Reviu Tata Kelola Pajak;
- o. Reviu Rotasi Mutasi;
- p. Reviu terhadap kepatuhan P3DN;
- q. Reviu JKN;
- r. Reviu tata kelola UKPBJ;
- s. Reviu tata kelola ADD; dan
- t. Reviu sisa DAK non fisik.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a. Monitoring P3DN;
- b. Monitoring evaluasi BOS;
- c. Evaluasi Benturan Kepentingan;
- d. Evaluasi Evaluasi Tata Kelola PTSP;
- e. Evaluasi SPM;
- f. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Evaluasi MR;
- h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- j. Verifikasi LHKPN;
- k. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- l. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- m. Evaluasi DAU yang ditentukan; dan
- n. Evaluasi Hibah Bansos.

6. Kegiatan Jasa Konsultasi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen. Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan

sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang;
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2023 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 410 TAHUN 2022
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Jadwal		PJ	HP			Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		SPV	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2023	Reviu	RKPD Perubahan Tahun 2023	OPD Pemda	Irbun Wil 3	Mg IV Juli 2023	Mg I Agustus 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
2	Reviu RKPD Murni Tahun 2024	Reviu	RKPD Murni tahun 2024	OPD Pemda	Irbun Wil 3	Mg II Mei 2023	Mg III Mei 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
3	Reviu RKA Tahun 2024	Reviu	RKA Tahun 2024	OPD Pemda	Semua Irbun Wilayah	Mg-IV Sep 2023	Mg-I Okt 2023	5	20	20	60	105	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
4	Reviu RKA Perubahan Tahun 2023	Reviu	RKA Perubahan Tahun 2023	OPD Pemda	Semua Irbun Wilayah	Mg-III Agus 2023	Mg-IV Agus 2023	5	20	20	60	105	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
5	Reviu PBJ oleh APIP	Reviu	PBJ	OPD Pemda	Irbun Wil 1	Mg-I April 2023	Mg-III Des 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
6	Reviu DAK Termin 3 Tahun lalu	Reviu	DAK Tahun 2022	OPD Pemangku DAK	Irbun Wil 2, 4	Mg-II Jan 2023 Mg-II Jan 2023	Mg-III Jan 2023 Mg-II Jan 2023	5	10	10	30	55	30 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
7	Reviu Kontrak DAK	Reviu	DAK Tahun 2023	OPD Pemangku DAK	Irbun Wil 2, 4	Mg-V Mar 2023 Mg-II Juli 2023	Mg-V Mar 2023 Mg-II Juli 2023	5	10	10	30	55	45 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
8	Reviu DAK Termin 1 Tahun Berjalan	Reviu	DAK Tahun 2023	OPD Pemangku DAK	Irbun Wil 2, 4	Mg-I April 2023 Mg-II Okt 2023	Mg-I April 2023 Mg-II Okt 2023	5	10	10	30	55	45 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
9	Reviu DAK Termin 2 Tahun Berjalan	Reviu	DAK Tahun 2023	OPD Pemangku DAK	Irbun Wil 2, 4	Mg-II April 2024 Mg-I Des 2023	Mg-II April 2023 Mg-I Des 2023	5	10	10	30	55	45 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
10	Reviu LK OPD oleh APIP	Reviu	LK OPD	OPD Pemda	Semua Irbun Wilayah	Mg-II Feb 2023	Mg-III Feb 2023	5	20	20	60	105	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
11	Reviu LK Pemda oleh APIP	Reviu	LK PEMDA	Pemda	Irbun Wil 3	Mg-I Maret 2023	Mg-II Maret 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
12	Reviu LKJIP oleh APIP	Reviu	LKJIP	OPD Pemda	Irbun Wil 1	Mg-III Maret 2023	Mg-IV Maret 2023	5	5	5	15	30	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
13	Reviu LPPD oleh APIP	Reviu	LPPD	Pemda	Irbun Wil 1	Mg-III Januari 2023	Mg-IV Januari 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
14	Reviu KUA-PPAS 2024	Reviu	KUA-PPAS Tahun 2024	Pemda	Irbun Wil 3	Mg-IV Mei 2023	Mg-I Juni 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
15	Reviu KUA-PPAS Perubahan 2023	Reviu	KUA-PPAS Perubahan 2023	Pemda	Irbun Wil 3	Mg-IV Juli 2023	Mg-I Agus 2023	5	5	5	15	30	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
16	Reviu HPS oleh APIP	Reviu	HPS 10 Progul	Pemda	Irbun Khusus	Mg-III Jan 2023	Mg-III Jan 2023	5	5	5	15	30	10 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori

17	Reviu SSH oleh APIP	Reviu	SSH	Pemda	Irbn Wil 4	Mg-II Maret 2023	Mg-II Maret 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
18	Reviu SAB oleh APIP	Reviu	SAB	Pemda	Irbn Khusus	Mg-I Juni 2023	Mg-I Juni 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
19	Reviu Manajemen ASN oleh	Reviu	Manajemen ASN	Pemda	Irbn Wil 3	Mg-I april 2023	Mg- II April 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
20	Reviu BMD oleh APIP	Reviu	BMD	Pemda	Irbn Wil 3	Mg- II Agus 2023	Mg- III Agus 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
21	Reviu Tata Kelola Pajak oleh APIP	Reviu	Tata Kelola Pajak	Pemda	Irbn Wil 3	Mg- II Agus 2023	Mg- III Agus 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
22	Reviu rotasi dan Mutasi oleh APIP	Reviu	Rotasi dan Mutasi	Pemda	Irbn Khusus	Mg-II Mei 2023	Mg-II Mei 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
23	Monitoring P3DN oleh APIP	Monitoring	P3DN	Pemda	Sekretariat	Januari 2023	Desember 2023	10	10	10	30	60	9.000.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
24	Reviu terhadap Kepatuhan P3DN	Reviu	P3DN	Pemda	Sekretariat	Mg IV Maret 2023	Mg I Des 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	4 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
25	Evaluasi Benturan Kepentingan oleh APIP	Evaluasi	Benturan Kepentingan	PNS	Irbn Khusus	Mg-III Juni 2023	Mg-III Juni 2023	5	5	5	15	30	4.500.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
26	Evaluasi Tata Kelola PTSP oleh APIP	Evaluasi	Tata Kelola PTSP	DPMP/PTSP	Irbn Wil 4	Mg-I Agus 2023	Mg-II Agus 2023	10	10	10	30	60	4.500.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
27	Reviu JKN oleh APIP	Reviu	JKN	Pemda	Irbn Wil 4	Mg-II Maret 2023	Mg-II Maret 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
28	Reviu Tata Kelola UKPBJ oleh APIP	Reviu	Tata Kelola UKPBJ	Pemda	Irbn Wil 1	Mg-III April 2023	Mg-III April 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
29	Reviu tata kelola ADD oleh APIP	Reviu	tata kelola ADD	Pemda	Irbn Khusus	Mg-III Februari 2023	Mg-III Februari 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
30	Evaluasi SPM oleh APIP	Evaluasi	SPM	Pemda	Irbn Wil 1	Mg-I Mei 2023	Mg-II Mei 2023	10	10	10	30	60	4.500.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
31	Evaluasi SAKIP oleh APIP	Evaluasi	SAKIP	OPD	Semua Irbn Wilayah	Mg-IV Jan 2023	Mg-I Feb 2023	10	40	40	120	210	10.800.000	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
32	Evaluasi MR oleh APIP	Evaluasi	MR	Pemda	Semua Irbn Wilayah	Mg-IV Okt 2023	Mg-I Nov 2023	10	40	40	120	210	10.800.000	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
33	Movev Bos oleh APIP	Movev	Bos	Dinas Pendidikan	Irbn Wil 2	Mg-I Apr 2023	Mg-II Apr 2023	10	10	10	30	60	4.500.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
34	Penilaian Mandiri SPIP oleh APIP	Assurance	Mandiri SPIP	Pemda	Semua Irbn Wilayah	Mg-I Jul 2023	Mg-II Jul 2023	10	40	40	120	210	10.800.000	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
35	Penilaian Mandiri PK APIP	Assurance	Mandiri	Pemda	Irbn Wil 1	Januari 2023	Juni 2023	10	40	40	120	210	4.500.000	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
36	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemertkasan APIP	Monitoring	Tindak Lanjut Hasil pemertkasan APIP	Pemda	Semua Irbn Wilayah	Mg-I Mei 2023	Mg-II Mei 2023	10	40	40	120	210	21.600.000	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
37	Verifikasi LHKPN	Assurance	LHKPN	Pemda	Tin LHKPN	Januari 2023	Maret 2023	-	-	-	-	-	1 Laporan	1	Laptop, ATK	-	Mandatori
38	Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Assurance	Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan	Pemda	Admin MCP	Januari 2023	Desember 2023	-	-	-	-	-	1 Laporan	1	Laptop, ATK	-	Mandatori
39	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif	Pemda	Irbn Wil 3	Mg-III Mar 2023	Mg-III Desember 2023	10	10	10	30	60	4.500.000	1 LHE	Laptop, ATK	-	Mandatori

40	Evaluasi DAU yang ditentukan oleh APIP	Evaluasi	DAU yang ditentukan	Pemda	Irban Wil 2, 4	Mg-II Feb 2023 Mg-II Jan 2023	Mg-II Feb 2023	10	20	20	60	110	9.000.000	2 LHE	Laptop, ATK	-	Mandatori
41	Reviu RB oleh APIP	Reviu	RB	Pemda	Semua Irban Wilayah, Sekretariat	Mg-III Jun 2023	Mg-IV Jun 2023	5	25	25	75	130	11.700.000	36 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
42	Evaluasi Hibah Bansos subsidi oleh APIP	Evaluasi	Hibah Bansos subsidi	Pemda	Irban Wil 3	Mg III Sept 2023	Mg IV Sept 2023	10	10	10	30	60	4.500.000	1 LHE	Laptop, ATK	-	Mandatori
43	Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Assurance	Kinerja	Pemda	Irban Khusus	Mg-I April 2023	Mg-II April 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHE	Laptop, ATK	-	Mandatori
44	Reviu Sisa DAK Non Fisik	Reviu	Sisa DAK	Pemda	Irban Wil 2, 4	Mg-I Maret 2023 Irban 2 tidak ada	Mg-I Maret 2023	5	10	10	30	55	5.400.000	2 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatori
45	Program Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Probit Audit	pembangunan Asrama SMPN 2 Sikakap	Dinas Pendidikan	Irban Wil 2	Mg-III Juli 2023	Mg-IV Juli 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
46	Program Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Probit Audit	Pembangunan Rumah Sakit dan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinkes	Irban Wil 4	Mg-V Agus 2023	Mg-V Agus 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
47	Program Penyelenggaraan Jalan (Mentawai Mantap)	Probit Audit	Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Sagitci Beritubu	PUPR	Irban Wil 3	Mg I Feb 2023	Desember 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
48	Program Penyelenggaraan Jembatan (Mentawai Mantap)	Probit Audit	Rehabilitasi Jembatan Talkako Hulu	PUPR	Irban Khusus	Mg-III April 2023	Mg-IV April 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
49	Program Penyelenggaraan Jalan (Mentawai Mantap)	Probit Audit	Peningkatan Rekonstruksi Jalan koridor matotan - Rogdog	PUPR	Irban Wil 2	Mg-IV Feb 2023	Mg-I Maret 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
50	Program Penyelenggaraan jalan (Mentawai Mantap)	Probit Audit	Rekonstruksi/ Peningkatan jalan Muara Sikabatuan - Mangangpoula - Soiboyak	PUPR	Irban Wil 2	Mg-II Maret 2023	Mg-III Maret 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
51	Program Pembangunan air Bersih (Mentawai Bersih)	Probit Audit	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	PUPR	Irban Wil 1	Mei 2023	Des 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
52	Program Penyelenggaraan jalan (Mentawai Mantap)	Probit Audit	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Mapadegat - Dermaga	PUPR	Irban Wil 2	Mg-IV Maret 2023	Mg-I Apr 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
53	Program Perikanan Tangkap (Mentawai berdaya saing)	Audit Kinerja	Pengadaan Alat Pengolahan	Dinas Perikanan	Irban Wil 1	Mei 2023	Des 2023	15	15	15	45	90	51.950.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Tahun Anggaran 2022
54	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Mentawai Berdaya Saing)	Probit Audit	Pemeliharaan Kawasan Wisata Mapadegat	Dinas Pariwisata	Irban wil 2	Mg-III Apr 2023	Mg-IV Apr 2023	15	15	15	45	90	11.250.000	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Program Unggulan
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Belanja pada DPMDP2KB	DPMDP2KB	Irban Wil 1	Mgg III Juli 2023	Mgg I Agustus 2023	15	15	15	45	90	28.600.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Belanja pada BKPSDM	BKPSDM	Irban Wil 3	Mg-III Nov 2023	Mg- IV Nov 2023	15	15	15	45	90	28.600.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai 3 E atas Belanja Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	DINAS KESEHATAN	Urban Wil 4	Mg-V Nov 2023	15	15	15	45	90	28.600.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
58	Program Penyelenggaraan Jalan	Audit Ketaatan	Menilai 3 E atas Belanja Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR	Urban Wil 2	Mg-II Agus 2023	15	15	15	45	90	28.600.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
59	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 1	Mg-IV Mei 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
60	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 1	Mg-II Sept 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
61	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 2	Mg-IV Mei 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
62	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 2	Mg-II Sept 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
63	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 3	Mg-III Mei 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
64	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 3	Mg-I Sept 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
65	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 4	Mg-IV Mei 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
66	Pengawasan Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Melakukan Pengawasan Terhadap 4 Aspek (Keuangan, Aset, SDM, Tupoksi)	3 Desa	Urban Wil 4	Mg-II Sept 2023	15	15	15	45	90	54.200.000	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
67	Jasa Konsultan	Pendampingan MR	Melakukan Pendampingan Manajemen Risiko	OPD/ Pemerintah Desa	Semua Urban Wilayah	Mg-III Okt 2023	15	60	180	315	18.000.000	36 Laporan	Laptop, ATK	-	-	
68	Jasa Konsultan	Pendampingan SPIP	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Dokumen SPIP	OPD/ Pemerintah Desa	Semua Urban Wilayah	Mg-I Jun 2023	15	60	180	315	18.000.000	36 Laporan	Laptop, ATK	-	-	
69	Pemeriksaan Khusus	PDTT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Desember 2023	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	-	
70	Pemeriksaan Khusus	PDTT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Desember 2023	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	-	
71	Pemeriksaan Khusus	PDTT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Desember 2023	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	-	

72	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
73	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
74	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
75	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
76	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
77	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
78	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
79	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
80	Pemeriksaan Khusus	PD/TT	Menilai ada atau tidaknya Fraud	OPD/ Pemerintah Desa	Urban Khusus	Januari 2023	Desember 2023	5	5	5	15	30	2.700.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
81	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Audit Ketataan	Dana Hibah	Bagian Kesra, Dinas Sosial, Kesbang.	Urban Wil 1	Mg-I Jan 2023	Mg-III Jan 2023	15	15	15	45	90	27.850.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
82	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Ketataan	Retribusi	Badan Keuangan Daerah	Urban Wil 3	Mg-I Des 2023	Mg-II Des 2023	15	15	15	45	90	27.850.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
83	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Ketataan	BOS SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urban Wil 2	Mg-I Nop 2023	Mg-II Nop 2023	15	15	15	45	90	27.850.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
84	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Audit Ketataan	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Urban Wil 4	Mg-II Nov 2023	Mg-III Nov 2023	15	15	15	45	90	27.850.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	
85	Pemeriksaan Desa Sikakap	Pemeriksaan Khusus	-	Desa Sikakap	-	-	-	15	15	15	45	90	49.880.000	1 LHP	Laptop, ATK	-	Permintaan APH

PJ. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D